



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110 Telepon (021) 3450038
laman: www.kemendagri.go.id, pos-el: puspen@kemendagri.go.id

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOMOR : 000.9.3.4/576.B/Puspen.3**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2026**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan Informasi Publik dan sesuai ketentuan pasal 4 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, perlu menyusun Daftar Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
- Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2026**

- KESATU : Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini.
- KEDUA : Melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, maka seluruh Informasi Publik yang tercantum dalam surat keputusan ini dinyatakan sebagai Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2026

Kepala Pusat Penerangan
Selaku PPID Utama
Kementerian Dalam Negeri,



Drs. Benni Irwan, M.Si., MA.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197301231992031001

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (sebagai laporan).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2026
NOMOR : 000.9.3.4/576.B/Puspen.3
TANGGAL : 3 Agustus 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2026

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/ SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB Pembuatan atau Penerbitan Informasi	BENTUK Informasi yang tersedia	BENTUK Informasi yang tersedia	RESISTENSI ARSIP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2025 - 2029	Kementerian Dalam Negeri	Menteri dalam Negeri	2025, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
2.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
3.	Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Kemendagri Tahun 2025	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
4.	Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Kemendagri Tahun 2024	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
5.	Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Kemendagri Tahun 2023	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	2024, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
6.	Data Statistik Keuangan Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2025, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
7.	Data Anggaran per URUSAN TA 2026 (542 daerah)	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
8.	RKA Tahun 2025	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
9.	RKA Tahun 2024	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	RKA Tahun 2023	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
11.	DIPA Tahun 2025	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
12.	DIPA Tahun 2024	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
13.	DIPA Tahun 2023	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
14.	Laporan Keuangan Kemedagri Tahun 2025 (Audited)	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
15.	Laporan Keuangan Kemedagri Tahun 2024 (Audited)	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
16.	Laporan Barang Milik Negara Tahun 2025	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
17.	Laporan Barang Milik Negara Tahun 2024	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
18.	Laporan Barang Pengguna Kemendagri Tahun 2025	Biro Keuangan dan Aset	Biro Keuangan dan Aset	2026, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
19.	Laporan Barang Pengguna Kemendagri Tahun 2024	Biro Keuangan dan Aset	Biro Keuangan dan Aset	2025, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
20.	Laporan Barang Pengguna Kemendagri Tahun 2023	Biro Keuangan dan Aset	Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Cetak & Digital	5 Tahun
21.	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
22.	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
23.	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
24.	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
25.	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan	2021, Jakarta	Digital	5 Tahun
26.	Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan	2020, Jakarta	Digital	5 Tahun
27.	Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2024	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2023	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
29.	Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2022	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
30.	Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2021	Biro Perencanaan	Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
31.	Rekap Renja 2025	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
32.	Rekap Renja 2024	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
33.	Rekap Renja 2023	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
34.	Rekap Renja 2022	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	2021, Jakarta	Digital	5 Tahun
35.	Laporan Keuangan Kemedagri Tahun 2024 (Audited)	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
36.	Rencana Umum Pengadaan Tahun 2024	UKPBJ	UKPBJ	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
37.	Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023	UKPBJ	UKPBJ	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
38.	Rencana Umum Pengadaan Tahun 2022	UKPBJ	UKPBJ	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
39.	Dokumen Tahap Pemilihan Tahun 2025	UKPBJ	UKPBJ	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
40.	Dokumen Tahap Pemilihan Tahun 2024	UKPBJ	UKPBJ	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
41.	Dokumen Tahap Pemilihan Tahun 2023	UKPBJ	UKPBJ	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
42.	Dokumen Tahap Pemilihan Tahun 2022	UKPBJ	UKPBJ	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
43.	Dokumen Tahap Pelaksanaan Tahun 2025	UKPBJ	UKPBJ	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
44.	Dokumen Tahap Pelaksanaan Tahun 2024	UKPBJ	UKPBJ	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
45.	Dokumen Tahap Pelaksanaan Tahun 2023	UKPBJ	UKPBJ	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
46.	Dokumen Tahap Pelaksanaan Tahun 2022	UKPBJ	UKPBJ	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
47.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-837Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Aset	2024,Jakarta	Digital	5 Tahun
48.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
49.	Permendagri Nomor 46 Tahun 2021 tentang	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Bagian	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyelesaian Kerugian Negara Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kemendagri		Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Aset			
50.	Data Pembendaharaan dan Inventaris	Biro Keuangan dan Aset	Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Aset	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
51.	Rekomendasi dan temuan Hasil Pengawasan Internal Tahun 2025	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
52.	Rekomendasi dan temuan Hasil Pengawasan Internal Tahun 2024	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
53.	Rekomendasi dan temuan Hasil Pengawasan Internal Tahun 2023	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2023, Jakarta	Digital	5 Tahun
54.	LLID Tahun 2025	Pusat Penerangan	PPID Kemendagri	Jakarta, Maret 2026	Cetak & Digital	5 Tahun
55.	LLID Tahun 2024	Pusat Penerangan	PPID Kemendagri	Jakarta, Maret 2025	Cetak & Digital	5 Tahun
56.	LLID Tahun 2023	Pusat Penerangan	PPID Kemendagri	Jakarta, Maret 2024	Cetak & Digital	5 Tahun
57.	LLID Tahun 2022	Pusat Penerangan	PPID Kemendagri	Jakarta, Maret 2023	Cetak & Digital	5 Tahun
58.	LLID Tahun 2021	Pusat Penerangan	PPID Kemendagri	Jakarta, Maret 2022	Cetak & Digital	5 Tahun
59.	LLID tahun 2020	Pusat Penerangan	PPID Kemendagri	Jakarta, Maret 2021	Cetak & Digital	5 Tahun
60.	Annual Report Pengaduan 2025	Pusat Penerangan	Pusat Penerangan	Jakarta, Maret 2026	Cetak & Digital	5 Tahun
61.	Annual Report Pengaduan 2024	Pusat Penerangan	Pusat Penerangan	Jakarta, Maret 2025	Cetak & Digital	5 Tahun
62.	Annual Report Pengaduan 2023	Pusat Penerangan	Pusat Penerangan	Jakarta, Maret 2024	Cetak & Digital	5 Tahun
63.	SK UPG 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
64.	SK TENAGA KEAMANAN	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
65.	SK TENAGA KEAMANAN PERUBAHAN I	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Masih Berlaku
66.	SK KADIN TENAGA KEBERSIHAN	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
67.	SK KADIN TENAGA KEBERSIHAN PERUBAHAN I	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
68.	SK KADIN TENAGA SUPIR	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
69.	SK KADIN TENAGA SUPIR PERUBAHAN I 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
70.	SK PEMBENTUKAN TIM KERJA 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
71.	SK KADIN TENAGA OPERATOR SIAK 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
72.	SK KADIN TENAGA OPERATOR SIAK PERUBAHAN I 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
73.	SK PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
74.	SK PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
75.	SK KADIN PEJABAT PENGADAAN 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
76.	SK PPK SKPD 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
77.	SK PPTK 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Berlaku
78.	SK PPTK 2025 PERUBAHAN I	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
79.	SK PPTK 2025 PERUBAHAN II	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
80.	SK STANDAR PELAYANAN 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
81.	SK PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN 2025	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
82.	Sk PPTK 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
83.	Sk Penunjukan Pejabat Pengadaan 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
84.	Sk PPTK 2026 Perubahan I	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
85.	Sk PPTK 2026 Perubahan li	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
86.	Sk Pembentukan Tim Kerja 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
87.	Sk Pembentukan Tim Kerja Dindukcapil 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
88.	Sk Penunjukan Pengelola Arsip 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
89.	Sk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
90.	Sk Reward N Punishment Kepada Pegawai Dukcapil 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
91.	Sk Jam Pelayanan 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
92.	Sk Kode Etik 2026 Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
93.	Sk PPK SKPD 2026	Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
94.	Profil Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
95.	Profil Pimpinan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
96.	Informasi Terkait Laporan LHKPN Pimpinan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
97.	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 2026	Cetak & Digital	1 Tahun
98.	Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 2026	Cetak & Digital	1 Tahun
99.	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 2026	Cetak & Digital	1 Tahun
100.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
101.	Informasi Mengenai Laporan Akses Layanan Informasi Kemendagri	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembangunan Daerah	Bina Pembangunan Daerah			Berlaku
102.	Media Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	Jakarta, 2026	Digital	Selama Masih Berlaku
103.	Surat Nomor 100.3.3/2644/BPD tanggal 12 Mei 2026	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Jakarta, 2026	Digital	5 Tahun
104.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri pada 24 Januari 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
105.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kejaksaan, Polri, KPK. Tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah pada 4 Februari 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
106.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pencarian dan Pertolongan pada 12 Februari 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
107.	MoU/NK antara Kemendagri dengan ATR/BPN, Kemenhut, Kementrans, BIG tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertahanan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial pada 17 Februari 2025	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
108.	MoU/NK antara Kemendagri dengan LKPP tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 3 Maret 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
109.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kemensos tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Kementerian Sosial pada 14 Maret 2025.					
110.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Grab Tentang Sinergi Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Berbasis Digital pada 17 Maret 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
111.	MoU/NK antara Kemendagri dengan BP Tapera tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pada 18 Maret 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
112.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Ikatan Komite Audit Indonesia tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada 18 Maret 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
113.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Bank Pembangunan	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
114.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Dalam Negeri dan Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada 21 April 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
115.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Penjamin Simpanan pada 30 April 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
116.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Dalam Negeri, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 07 Mei 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
117.	MoU/NK antara Kemendagri dengan	Pusat Fasilitas Kerja	Kepala Pusat Fasilitas Kerja	2025, Jakarta	Digital	Selama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kementerian Pekerjaan Umum tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum pada 07 Mei 2025.	Sama	Sama			berlaku
118.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang dalam Negeri dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi pada 09 Mei 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
119.	MoU/NK antara Kabupaten Halmahera dengan Kemendagri dan Badan Pusat Statistik pada 21 Mei 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
120.	MoU/NK antara Kota Surabaya dengan Kemendagri dan Badan Pusat Statistik pada 21 Mei 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
121.	MoU/NK antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat dan Badan Narkotika Nasional tentang Penguatan Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika pada 21 Mei 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
122.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 02 Juni 2025.	Pusat Fasilitas Kerja Sama	Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama	2025, Jakarta	Digital	Selama berlaku
123.	Salinan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah	Ditjen Otonomi Daerah	Dirjen Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	Selama berlaku
124.	Dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar pertimbangan penunjukan kepala daerah	Ditjen Otonomi Daerah	Dirjen Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	Selama berlaku
125.	Hasil Penilaian Akhir Tim Penilai Penjabat Kepala Daerah	Ditjen Otonomi Daerah	Dirjen Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	Selama berlaku
126.	Profil Kandidat Penjabat Kepala Daerah	Ditjen Otonomi Daerah	Dirjen Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	Selama berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
127.	Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	2022, Jakarta	Cetak dan Digital	10 Tahun
128.	Daftar Tahap Perumusan	Biro Hukum	Biro Hukum	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
129.	Daftar Rancangan Peraturan Yang Dibentuk	Biro Hukum	Biro Hukum	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
130.	Daftar Risalah Rapat	Biro Hukum	Biro Hukum	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
131.	Daftar Masukan Peraturan	Biro Hukum	Biro Hukum	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
132.	Data Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
133.	Data Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
134.	Salinan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
135.	Dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar pertimbangan penunjukan Kepala Daerah	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
136.	Hasil penilaian akhir Tim Penilai Penjabat Kepala Daerah	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
137.	Profil Kandidat Penjabat Kepala Daerah	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	2022, Jakarta	Digital	5 Tahun
138.	Data Rekapitulasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab/Kota Se-Indonesia	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Bina, Ideologi, Wawasan dan Kebangsaan	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
139.	Data Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Bina, Ideologi, Wawasan dan Kebangsaan	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
140.	Data Provinsi, Kab/Kota yang telah membentuk Timdu Penanganan Konflik Sosial	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Kewaspadaan Nasional	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
141.	Tabel dan Grafik Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial di Indonesia	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Kewaspadaan Nasional	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
142.	Petunjuk Teknis Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan	Direktur Politik Dalam Negeri	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kab/Kota Se-Indonesia					
144.	Data Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Bina, Ideologi, Wawasan dan Kebangsaan	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
145.	Data Skors Indeks Demokrasi Indonesia Nasional	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktorat Politik Dalam Negeri	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
146.	Data Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Jumlah Suara Sah Pemilu Di DPR Tingkat Pusat	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Politik Dalam Negeri	2024, Jakarta	Digital	5 Tahun
147.	Data Urusan Pelayanan Dasar 2021 s.d 2025	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
148.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2025, Jakarta	Digital	5 Tahun
149.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
150.	Data Anggaran dan Realisasi Belanja di Sumatera Barat Tahun 2018-2024	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
151.	Laporan APBD Induk Prov. Riau 2023-2024 (Kota Pekanbaru)	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
152.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia Tahun 2023	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
153.	Data Belanja Daerah untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal seluruh Pemerintah Indonesia	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
154.	Laporan APBD pemerintah daerah diseluruh indonesia tahun anggaran 2023	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
155.	Data APBD Induk 2020-2023	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Perencanaan Aggaran Daerah	2024, Jakarta	Cetak dan Digital	5 Tahun
156.	Data APBD Perubahan 2020-2023	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Perencanaan Aggaran Daerah	2024, Jakarta	Cetak dan Digital	5 Tahun
157.	Data Penetapan Perda APBD 2020-2023	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Perencanaan Aggaran Daerah	2024, Jakarta	Cetak dan Digital	5 Tahun
158.	Data Anggaran Perurusan dan Fungsi 2020-2023	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Perencanaan Aggaran Daerah	2024, Jakarta	Cetak dan Digital	5 Tahun
159.	Data Anggaran SPM Tahun 2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Perencanaan Aggaran Daerah	2024, Jakarta	Cetak dan Digital	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
160.	Data Anggaran Mandatory Spending Tahun 2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah	2024, Jakarta	Cetak dan Digital	5 Tahun
161.	Data Realisasi APBD 2021-2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2024, Jakarta	Cetak dan Digital	5 Tahun
162.	Data Penetapan Perda Pertanggungjawaban 2019- 2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
163.	Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah 2021 - 2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
164.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
165.	Data Realisasi DAU,DAK, DBH, dan Dana Otsus 2021	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Dana Transfer	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
166.	Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah 2021-2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
167.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
168.	Data Realisasi DAU,DAK, DBH, dan Dana Otsus	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Dana Transfer	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
169.	Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah 2021-2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
170.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
171.	Data Realisasi DAU,DAK, DBH, dan Dana Otsus Tahun 2021	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Dana Transfer	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
172.	Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah 2021 - 2023	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
173.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Pendapatan Daerah	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
174.	Data Realisasi DAU,DAK, DBH, dan Dana Otsus	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Direktur Dana Transfer	2024, Jakarta	Cetak	2021
175.	Data Pemekaran wilayah administratif di Indonesia dalam rentang waktu tahun 1999 hingga 2022	Ditjen Otonomi Daerah	Ditjen Otonomi Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun
176.	Data pemekaran wilayah administratif di	Ditjen Otonomi Daerah	Ditjen Otonomi Daerah	2026, Jakarta	Digital	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Indonesia dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2025					
177.	Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang diprakarsai oleh Ditjen Otonomi Daerah yang telah disahkan	Ditjen Otonomi Daerah	Sekretaris Ditjen	2024, Jakarta	Cetak	Selama masih berlaku
178.	Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2023	Ditjen Otonomi Daerah	Sekretaris Ditjen	2024, Jakarta	Cetak	Selama masih berlaku
179.	Daftar Perjanjian Kinerja di lingkungan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2023	Ditjen Otonomi Daerah	Sekretaris Ditjen	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
180.	Daftar Perjanjian Kinerja di lingkungan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2024	Ditjen Otonomi Daerah	Sekretaris Ditjen	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
181.	Ringkasan Rencana Kerja Ditjen Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2024	Ditjen Otonomi Daerah	Sekretaris Ditjen	2024, Jakarta	Cetak	5 Tahun
182.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kemenkeu tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Keuangan Negara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
183.	MoU/NK antara Kemendagri dengan PT. Bank Mandiri Persero Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Perbankan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
184.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
185.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kemenkumham tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
186.	MoU/NK antara Kemendagri dengan OJK tentang Penguatan Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
187.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kehutanan tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Berlaku
188.	PKS antara Kemendagri dengan PT. BTN (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
189.	MoU/NK antara Kemendagri dengan BNPP dan BSSN tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pengelolaan Perbatasan Negara, serta Keamanan Siber dan Sandi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
190.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Luar Negeri tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Pemerintahan Luar Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
191.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Yayasan Bhakti Tanoto tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
192.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pertanian tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
193.	MoU/NK antara Kemendagri dengan PPATK tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
194.	MoU/NK antara Kemendagri dengan PT Tempo Inti Media tentang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
195.	MoU/NK Kemendagri dengan Yayasan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nusantara Sejati (YNS) tentang Dukungan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melalui Penerapan Program Review	Sama	Sama			Masih Berlaku
196.	MoU/NK Kemendagri dengan Persatuan Wredatama Republik Indonesia tentang Pelatihan dan Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Sebelum Memasuki Masa Pensiun	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
197.	MoU/NK Kemendagri dengan Kemenlu, Kemenkumham, Kemnaker dan BP2MI tentang Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
198.	MoU/NK Kemendagri dengan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Pengelolaan Keuangan Haji	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
199.	MoU/NK antara Kemendagri, Kemenag, Kemenkes, Kemnaker, KemenPPPA dan BKKBN tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
200.	MoU/NK Kemendagri dengan Universitas Krisnadwipayana tentang Koordinasi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan Universitas Krisnadwipayana	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
201.	PKS Kemendagri dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data antar Sistem Informasi Online Layanan Administrasi dan Sistem Klirens Etik	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
202.	2MoU/NK antara Kemendagri dengan BNI tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
203.	MoU/NK antara Kemendagri dengan BPOM	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Sama	Sama			Masih Berlaku
204.	Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Arah Program (AP) antara Kementerian Dalam Negeri dengan Ford Foundation tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Program Prioritas Nasional bagi Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
205.	Perjanjian Internasional Host Country Agreement (HCA) antara Kementerian Dalam Negeri dengan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) terkait pelaksanaan International Mayors Forum (IMF)	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
206.	Penandatanganan Lol antara Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Markany INC, RRT	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
207.	Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, dan Universitas Mahidol International College, Kerajaan Thailand	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
208.	Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Kitakyushu, Prefektur Fukuoka, Jepang	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
209.	Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jiangxi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
210.	Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Melbourne, Negara Bagian Victoria, Persemakmuran Australia	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
211.	Penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kota Hluboka, Ceko	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
212.	Penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan IHE Delft Institute for Water Education Delft, The Netherlands	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
213.	Penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan IHE Delft Institute for Water Education Delft, The Netherlands	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
214.	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Daerah Arges, Rumania	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
215.	Penandatanganan Lol antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Daedeok-Gu, Kota Metropolitan Daejeon, Republik Korea	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
216.	Penandatanganan Lol antara Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Piraeus, Republik Hellenik, Yunani	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
217.	Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Arah Program (AP) antara Kementerian Dalam Negeri dengan Ford Foundation tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Program Prioritas Nasional bagi Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
218.	Perjanjian Internasional Host Country Agreement (HCA) antara Kementerian Dalam Negeri dengan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) terkait pelaksanaan International Mayors Forum (IMF)	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2024, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
219.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Perpustakaan Nasional tentang Sinergi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional RI					Berlaku
220.	Mou/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
221.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kejaksaan, Polri, KPK. Tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
222.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pencarian dan Pertolongan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
223.	MoU/NK antara Kemendagri dengan ATR/BPN, Kemenhut, Kementrans, BIG tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertahanan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
224.	Mou/NK antara Kemendagri dengan LKPP tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
225.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kemensos tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
226.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Grab Tentang Sinergi Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Berbasis Digital	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
227.	Mou/NK antara Kemendagri dengan BP Tapera tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat					
228.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Ikatan Komite Audit Indonesia tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
229.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
230.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Dalam Negeri dan Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
231.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Penjamin Simpanan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
232.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Dalam Negeri, Imigrasi dan Pemasarakatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
233.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pekerjaan Umum tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
234.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Sinergi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tugas dan Fungsi dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan					
235.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang dalam Negeri dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
236.	Mou/NK antara Kabupaten Halmahera dengan Kemendagri dan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
237.	Mou/NK antara Kota Surabaya dengan Kemendagri dan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
238.	MoU/NK antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat dan Badan Narkotika Nasional tentang Penguatan Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
239.	MoU/NK antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat dan Badan Narkotika Nasional tentang Penguatan Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
240.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lingkungan Hidup					
241.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Badan Gizi Nasional tentang Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Gizi Nasional	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
242.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Bdan Penyelenggara Haji tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Dalam Negeri dan di Bidang Penyelenggaraan Haji	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
243.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Pusat Statistik tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Penyediaan dan Pemukhtahiran Data dan/atau Informaasi Statistik dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Bepenghasilan Rendah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
244.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan dalam Negeri dan di Bidang Perlindungan Saksi dan Korban	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
245.	Mou/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Aksi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak untuk Penguatan Pelindungan Anank di Era Digital	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
246.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Universitas Hasanuddin tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kementerian Dalam Negeri dan Universitas Hasanuddin					
247.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Yayasan Monash University Indonesia tentang Koordinasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan Monash University Indonesia	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
248.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
249.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Kesehatan tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri di Bidang Kesehatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
250.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Sinergi Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
251.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Perdagangan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
252.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Kebudayaan tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
253.	MoU/NK antara Kemendagri, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Yayasan Purnomo Yusgiantoro tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Daerah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
254.	MoU/NK antara Kemendagri dengan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kementerian Komunikasi dan Digital tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Dalam Negeri dengan Bidang Komunikasi dan Informasi pada	Sama	Sama			Masih Berlaku
255.	MoU/NK antara Kemendagri dengan PT Bank Syariah Indonesia tbk tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Bank Syariah Indonesia	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
256.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Dalam Negeri serta Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
257.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pertahanan tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Dalam Negeri dan di Bidang Pertahanan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
258.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Sinergi Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
259.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah pada	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
260.	MoU/NK antara Kemendagri dengan Perpustakaan Nasional tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nasional RI					
261.	Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Arahan Program (AP) antara Kemendagri dengan Rikolto tentang Dukungan Terhadap Sistem Pangan Yang Berkelanjutan dan Inklusif	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
262.	Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Arahan Program (AP) antara Kemendagri dengan Stitching SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie tentang Program Pembangunan Terpadu Berkelanjutan di Bidang Pertanian dan Pangan Berkelanjutan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
263.	Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Arahan Program (AP) antara Kemendagri dengan OISCA tentang Program Dukungan Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat di Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
264.	Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) antara Kemendagri dengan Corus International tentang Percepatan Kolaborasi Multisektoral untuk Peluang dan Kesehatan yang Inklusif bagi Perempuan Tahun 2025- 2026 di Kab. Karo, Sumatera Utara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
265.	Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) antara Kemendagri dengan Corus International tentang Percepatan Kolaborasi Multisektoral untuk Peluang dan Kesehatan yang Inklusif bagi Perempuan Tahun 2025- 2026 di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
266.	Lol antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo RI dengan Y2 Blend LLC Prefektur Kagawa, Jepang tentang Kerja Sama di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Perdagangan Hasil Kelautan Perikanan dan Pertanian	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
267.	Lol antara Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat RI dengan Pemerintah Kota	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nanning, Provinsi Guangxi Zhuang, RRT tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Persahabatan					Berlaku
268.	Lol antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat RI dengan Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL), Malaysia tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
269.	Lol antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta RI dengan Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL), Malaysia tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
270.	Lol antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RI dengan Pemerintah Kota Hefei Provinsi Anhui, RRT tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
271.	Lol antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta RI dengan Pemerintah Provinsi Chungcheongnam, Republik Korea tentang Pembentukan Kerja Sama Provinsi Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
272.	Lol antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Republik Indonesia dengan University of Nottingham, Inggris Raya tentang Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berskala Global	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
273.	Lol antara Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kota Binzhou, Provinsi Shandong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
274.	Lol antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta RI dengan Pemerintah Provinsi Jeju, Republik Korea tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
275.	Lol antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara RI dengan Ironman Group, Amerika Serikat tentang Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Berkelanjutan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
276.	Lol antara Pemerintah Kota Surakarta RI dengan Pemerintah Kota Xian, Shaanxi RRT tentang Pembentukan Kerja Sama Sister City	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
277.	Lol antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Yunnan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tentang Pembentukan Kerja Sama Provinsi Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
278.	Lol antara Pemerintah Kota Kendari dengan Pemerintah Kota La Rochelle tentang Pembentukan Kerja Sama Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
279.	Lol antara Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Negeri Melaka, Malaysia tentang Kerja Sama Provinsi Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
280.	MoU antara Pemerintah Kota Bandung dengan Hamamatsu Jepang tentang Kerja Sama Pengembangan Kota	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
281.	Lol antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Malaysia tentang Pembentukan Kerja Sama Persahabatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
282.	Lol antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Metropolitan Ankara tentang Pembentukan Kerja Sama Persahabatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
283.	Lol antara Pemerintah Kab. Gianyar Bali dengan Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama Kota bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
284.	Lol antara Pemerintah Kota Bandar Lampung RI dengan Pemerintah Kota Zhengzhou, Provinsi Henan RRT tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
285.	Lol antara Kab. Klaten RI dengan Kota Nanjing City, Fujian, RRT tentang Pembentukan Kerja Sama Sister City	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
286.	MoU/NK antara Pemerintah Kota Kendari dengan Communauté d'Agglomération de La	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rochelle, Republik Perancis tentang Kerja Sama Sister City					Berlaku
287.	MoU antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta RI dengan Negara Bagian Victoria, Australia tentang Kerja Sama Provinsi-Negara Bagian	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
288.	LoI antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan Provinsi Kota Sue Machi Prefektur Fukuoka Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
289.	MoU antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia, dengan Kota Hluboká nad Vltavou, Republik Ceko tentang Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
290.	LoI antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Kota Tono, Prefektur Iwate, Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama Persahabatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
291.	LoI antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kota Higashikawa, Prefektur Hokkaido, Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama Persahabatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
292.	Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Arah Program (AP) antara Kemendagri dengan Rikolto tentang Dukungan Terhadap Sistem Pangan Yang Berkelanjutan dan Inklusif	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2025, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
293.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang Terkait dengan Pengawasan Persaingan Usaha dan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
294.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bidang Dalam Negeri dan Manajemen Aparatur Sipil Negara.					
295.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan di Bidang Dalam Negeri.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
296.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan di Bidang Dalam Negeri.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
297.	PKS antara Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Interoperabilitas Data pada Sistem E-Monev dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Rangka Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko, Pembangunan Pusat-Daerah.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
298.	MoU/NK antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Korps Kadet Republik Indonesia.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
299.	PKS antara Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data antara Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Elektronik Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.					
300.	PKS antara Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pegawai Negeri Sipil dan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
301.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
302.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
303.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
304.	MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang Terkait dengan Pengawasan Persaingan Usaha dan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
305.	Country Programme Action Plan 2026 - 2030 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
306.	MSP antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Corus International	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tentang Dukungan Pencapaian Program Pembangunan Berkelanjutan di Daerah					Berlaku
307.	Lol antara Pemkab. Tapin, Kalimantan Selatan dengan Holmesglen Institute Kota Melbourne, Negara Bagian Victoria Persemakmuran Australia tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Profesional Guru dalam Bidang Pendidikan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
308.	Lol antara Pemkab. Tapin, Kalimantan Selatan dengan Technical and Further Education New South Wales (Tafe NSW), Kota Sydney, Negara Bagian New South Wales, Persemakmuran Australia tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Profesional Guru dalam Bidang Pendidikan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
309.	Lol antara Pemkot. Bekasi, Jawa Barat dengan Pemkot. Seongnam, Provinsi Gyeonggi, Republik Korea tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersahabat	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
310.	Lol antara Pemkot. Bekasi, Jawa Barat dengan Pemkot. Izumisano, Prefektur Osaka, Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
311.	Lol antara Pemkab. Batang, Jawa Tengah dengan Pemkot. Fuqing, Fujian, RRT tentang Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
312.	MSP antara Pemprov. DKI Jakarta dengan Pemprov. Otonomi Jeju, Republik Korea tentang Pembentukan Kerja Sama Persahabatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
313.	Lol antara Pemkot Banda Aceh, Aceh dengan Pemkot. Higashimatsushima, Miyagi, Jepang tentang Kerja Sama dan Kolaborasi	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
314.	Lol antara Pemkot. Kendari, Sulawesi Tenggara dengan Pemkot Yiwu, Provinsi Zhejiang, RRT tentang Pembentukan Kerja	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sama Kota Bersaudara					
315.	Lol antara Pemkab. Badung, Bali dengan Pemkot. Fujisawa, Prefektur Kanagawa, Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
316.	Lol antara Pemkot Banda Aceh, Aceh dengan Pemkot Grasse, Wilayah Provence-Alpes-Côte d'Azur, Republik Prancis tentang Pembentukan Kerja Sama Persahabatan	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
317.	MoU antara Pemkab. Gianyar, Bali dengan Pemkot. Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang tentang Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
318.	MSP antara Pemkot Padang, Sumatera Barat dengan Pemkot Hildesheim, Lower Saxony, Republik Federal Jerman tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
319.	Country Programme Action Plan 2026 - 2030 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Cetak	Selama Masih Berlaku
320.	Rencana strategis Ditjen Otonomi daerah	Ditjen Otonomi Daerah	Sekretaris Ditjen	2020	Cetak	5 tahun
321.	Daftar hasil-hasil penelitian yang dilakukan	IPDN	Kepala Lembaga Penelitian	IPDN Jatinangor	Digital	Selama masih berlaku
322.	Daftar Peraturan perundang- undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	IPDN	Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat	IPDN Jatinangor	Digital	Selama masih berlaku
323.	Daftar Informasi kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum	IPDN	Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan	IPDN Jatinangor	Digital	Selama masih berlaku
324.	Data Penduduk Kabupaten/Kota/Provinsi - Usia Produktif (data bersifat terbuka)	Ditjen. Dukcapil	Direktur Pendaftaran Penduduk	2022	Digital	20 Tahun
325.	Permendagri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Persyaratan dan Tata cara Penyesuaian/Inpas sing serta pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
326.	Permendagri Nomor 6 Tahun 2019 tentang	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-	2019	Cetak dan	Selama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kebutuhan Persyaratan, dan Tata Cara Penyesuaian/InpUS sin serta pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		undangan		Digital	Masih Berlaku
327.	Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
328.	Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
329.	Permendagri Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
330.	Permendagri Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
331.	Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
332.	Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Admuduk	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
333.	Permedagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
334.	Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian administrasi kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku
335.	Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
336.	Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2019	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
337.	Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2020	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
338.	Permendagri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2020	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
339.	Permendagri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2020	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
340.	Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2020	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
341.	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2020	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
342.	Permendagri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2021	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
343.	Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standarisasi dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2022	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
344.	Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2022	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
345.	Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-undangan	2022	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
346.	Permendagri No 2 Tahun 2023 tentang	Ditjen. Dukcapil	Kepala Bagian Perundang-	2023	Cetak & Digital	Selama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perubahan atas Permendagri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring		undangan			Masih Berlaku
347.	SOP Pemberian Akses Aplikasi Petugas Khusus kepada tim Khusus Kab/kota	Ditjen. Dukcapil	Direktur Bina Aparatur	2020	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
348.	SOP Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil Daerah	Ditjen. Dukcapil	Direktur Bina Aparatur	2019	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
349.	Informasi Terkait Laporan LHKPN Pimpinan di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Bagian Perencanaan	2026, Jakarta	Digital	1 Tahun
350.	Rencana Kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Perencanaan	2026, Jakarta	Cetak & Digital	1 Tahun
351.	Agenda Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Umum	2026, Jakarta	Digital	Selama Masih Berlaku
352.	Laporan Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Perencanaan	2026, Jakarta	Cetak & Digital	1 Tahun
353.	Laporan Keuangan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Keuangan	2026, Jakarta	Digital	1 Tahun
354.	Laporan Barang Milik Negara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Umum	2026, Jakarta	Digital	1 Tahun
355.	Informasi Mengenai Regulasi Kelitbangan	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Seluruh UKE II Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	2026, Jakarta	Digital	Selama Masih Berlaku
356.	Media dan Jurnal Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Umum	2026, Jakarta	Digital	Selama Masih Berlaku
357.	Media Kebijakan	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Umum	2026, Jakarta	Cetak & Digital	1 Tahun
358.	Jurnal Bina Praja	Sekretariat Badan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Umum	2026, Jakarta	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku
359.	Jurnal Matra Pembaruan	Sekretariat Badan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Umum	2026, Jakarta	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
360.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022	Sekretariat Badan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Bagian Keuangan	2026, Jakarta	Cetak & Digital	Selama Masih Berlaku

Kepala Pusat Penerangan
Selaku PPID Utama
Kementerian Dalam Negeri,



[Handwritten signature in blue ink]
Drs. Benni Irwan, M.Si., MA.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197301231992031001